

**KONSTITUSIONALITAS
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Kajian Pasal 7 Ayat (1) Butir b Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)**

DISERTASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Doktor
Ilmu Hukum



Oleh:
Joko Widarto
NIM: 127010100111012

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**